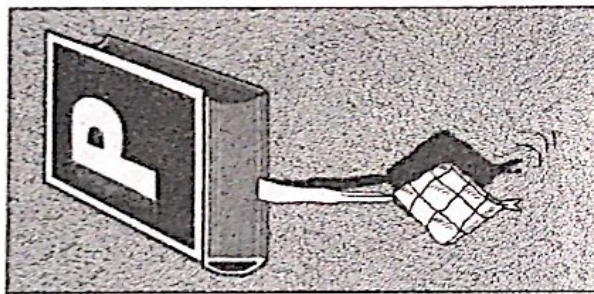


# Ada Apa (lagi) dengan Pasraman

Seorang karib yang sedang menyelesaikan kuliah doktoralnya mengabarkan saat ini sudah banyak pasraman, terutama di Jawa yang diakui di Kemen-diknas. "Kok bisa?", "Iya bisa-lah. Kalau tidak terdaitar di Diknas, ya mereka tidak akan diakui lalasanya". "Bagaimana caranya?". "Terpaksa mereka mengikuti regulasi yang dikeluarkan Diknas, termasuk muatan materi dan kurikulumnya". "Loh bukankah Pasraman sudah ada payung hukumnya dari Kemenag?". "Mahuada, Pokoknya complicated". Ya begitulah. Begitu apanya? Mari kita de-ngarkan lagi beberapa cerita yang lain.

Dalam sebuah sosialisasi PMA 56/2014 disebut hotel mewah di Cawang, Jakarta Timur, seorang peserta dengan lantang bilang pasraman yang sudah berjalan selama ini akan lenyap, umat Hindu akan tak ter-bina, dan gampang dikonsersi. Kalau begini terus, Kemenang tidak sanggup menjalankan fungsi pembinaan terutama di-bidang pendidikan. Aturan se-perti PMA ini jangan bikin agama Hindu jadi mundur, dong. Masih banyak lagi protesnya, mungkin lebih tepat curhat.

Sepertinya yang bersangkutan belum membaca utuh PMA itu. Wajar dia sedikit emosional. PMA



ini terang tak akan "membunuh" pasraman atau tepatnya Sekolah Minggu yang dilaksanakan umat Hindu, terutama di luar Bali. Sekolah Minggu harus tetap ada dan tak bisa digantikan begitu saja oleh pasraman seperti dimaksud dalam PMA yang sepenuhnya diarahkan menjadi Pasraman Formal. Jika rujukan-nya PMA, Sekolah Minggu bu-kan termasuk Pasraman Formal tetapi kegiatan belajar yang di-fungsikan untuk memberikan

matapelajaran tambahan, dalam hal ini, agama yang tidak di-peroleh siswa di sekolah umum tempatnya belajar. Clear.

Malah kalau mau jujur-jujuran, Sekolah Minggu itu tidak hanya tempat mencari nilai mapel agama, tetapi juga untuk urusan lain. Misalnya, para orang tuanya sekalian pergi ke-pura untuk arisan tempek atau arisan keluarga; mengenalkan anak-anaknya pada pura dan sembahyang; memperkuat bu-daya melalui ragam kursus tari atau tahlui yang biasanya dilak-sanakan di aula; dan mencari-nan jodoh anak-anaknya. What? Tu-juan yang terakhir ini cukup menarik. Anak-anak di luar Bali biasanya kesulitan mendapatkan jodoh sesama Hindu, syukur-syukur dari Bali. Daripada anak perempuan berpindah aga-ma atau anak laki-lakinya pindah keagamaan, tujuan lain mengikuti Sekolah Minggu seperti ini dapat dimaklumi, bahkan di-maafkan saja.

Masih ada dua cerita lain lagi yang terdengar nyaring saat sosialisasi tentang Pasraman Non Formal di bilangan Kuta. Rupanya sampai saat ini pun, bentuk Pasraman Non Formal belum dipahami secara jelas dan hanya terpaku pada isi peraturan baik UU 20/2003 maupun PP 55/2007. Padahal Pasraman Non

## I Nyoman Yoga Segara



menyegerakan dibuat formulasi yang jelas dan terukur, lengkap untuk mengurai masalah seperti pasraman. Dibahasnya RUU tentang Pesantren dan Pen-didikan Keagamaan masih belum menjamin apakah benar-kusut ini akan tuntas. Sebenar-nya pula, tidak cukup mendi-rikan pasraman, apalagi secara sporadis, karena membangun rumah saja tidak cukup. Purni-ture interornya pasti sangat menentukan sebuah mutu, apa-kah rumah itu akan terlihat indah atau artistik. Bagaimana pula dengan 8 standar nasional pen-di-dikan yang harus disediakan se-buah satuan pendidikan? Diskusi ini akan cukup panjang jika tak ada blue print pasraman. Ma-salahnya, beberapa Pembimas di Indonesia sudah mulai mengul-luskan pasraman yang ada di wilayahnya tidak akan diakui.

Dalam semua regulasi, pasra-man bisa dilakukan dengan formal, non formal dan informal. Masing-masing memi-liki tujuan yang mulia namun dengan bentuk yang berbeda. Pasraman tidak harus formal, karena melaksanakannya secara non formal dan informal sama-luhurmya. Umat kadung ber-harap banyak dari janji perem-rintah yang akan hadir sepe-

nuhnya melalui Pasraman For-mal, padahal pemerintah belum siap dalam banyak hal. Timi-ni-bang membuat pasraman makin pereng di simpang jalan, pemerintah patutnya mendorong semua bentuk pasraman dapat berdiri, aktif, dan konsisten da-lam membina umat. Lagi-lagi, umat tak bisa ditalahkan untuk memiliki Pasraman Formal, karena ada jalan lapang yang dibayangkan. Misalnya, pem-biayaan akan menjadi lebih ringan, pembinaan akan sema-kin intensif, pembinaan lebih intensif, terserapnya tenaga pendidik dan kependidikan, dan lulusannya terjamin.

PMA sudah berumur lima tahun, RUU jika tak ada hala-ngan, mungkin tahun ini akan disahkan DPR, tapi kita dan umat masih ngabag-ngabagi apa itu pasraman. Jika sampai saat ini umat masih bingung harus ngapa-in dengan pasramannya, jangan-jangan suara umat seperti di atas juga makin keris, atau malah melemah seperti baterai yang soak. Lait ditunggu.

\*Penulis, Antropolog  
IHND Denpasar